

BAB IV

KESIMPULAN

Dari penjabaran pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor ekonomi-politik dan identitas sama-sama turut mempengaruhi kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Faktor ekonomi-politik tetap menjadi salah satu bahan pertimbangan kebijakan Amerika Serikat dalam invasi ke Afghanistan, mengingat bukti-bukti yang menunjukkan keterkaitan Amerika Serikat dengan upaya eksploitasi minyak dan gas Afghanistan jauh sebelum terjadinya perang. Sementara itu faktor identitas, khususnya yang terkait dengan kultur, memiliki signifikansi dalam mempengaruhi dan membentuk kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap entitas lain, khususnya yang beridentitas Islam, termasuk Afghanistan.

Pengaruh yang dimaksud adalah bahwa identitas kultural membentuk cara pandang masyarakat Amerika Serikat pada umumnya dan para pengambil kebijakan pada khususnya, yang pada gilirannya akan menjadi salah satu bahan pertimbangan, atau bahkan justifikasi dalam pengambilan suatu kebijakan luar negeri. Hal inilah yang membedakan perspektif ini dengan perspektif yang secara deterministik memandang faktor identitas/kultural/peradaban sebagai faktor penentu dalam kebijakan luar negeri hingga konstelasi internasional (khususnya dalam bentuk konflik). Pengejawantahan pengaruh faktor kultural tadi dalam kasus Afghanistan adalah:

Faktor identitas menjadi satu dari sekian banyak faktor yang membentuk opini masyarakat luas dalam memandang Islam identik dengan kekerasan, terorisme, dan dengan demikian menjadi ancaman keamanan bagi Amerika Serikat. Hal serupa juga dapat diterapkan pada level pengambil kebijakan. Selain peristiwa 11 September, maka hal yang juga turut membentuk perspektif ini khususnya bagi para pengambil kebijakan adalah peristiwa Revolusi Iran 1979 serta penyanderaan diplomat-diplomat AS di negara tersebut segera setelahnya. Dalam kasus ini penulis berpendapat bahwa pandangan yang menyatakan bahwa AS memiliki kebencian historis berabad-abad yang inheren terhadap Islam (sebagaimana yang menurut Fernand Braudel dialami oleh negara-negara

Eropa) adalah tidak benar. Hal ini termasuk kebencian yang dianggap muncul karena keberadaan Islam itu sendiri sebagai suatu konsep yang sejak kelahirannya telah menyerang prinsip fundamental Kristen Barat. Dalam kasus AS-Afghanistan, penulis melihat bahwa faktor Islam berperan sebagai variabel karena ia dianggap sebagai bahaya kontemporer yang baru muncul selama beberapa dekade terakhir (seperti disebutkan pada contoh diatas), dan bahaya tersebut berasal dari persepsi Amerika Serikat bahwa beberapa entitas yang berkultur Islam, dengan segala tindakannya, mengancam kepentingan ekonomi-politik (hegemoni)-nya di dunia internasional.

Peran faktor identitas/kultural di sini secara lebih spesifik adalah:

1. Sebagai penegas perbedaan antara *in-group* dan *outsider*.
2. Perbedaan tersebut kemudian membantu pendefinisian kepentingan nasional.
3. Kepentingan yang telah terdefinisi tersebut, walau pada suatu titik lebih dipengaruhi pertimbangan ekonomi, kemudian dipertegas kembali dengan menggunakan faktor identitas tadi sebagai justifikasi dari suatu kebijakan.

Jadi di sini penulis menyimpulkan bahwa interaksi kedua faktor tadi (ekonomi-politik dan kultural) bersifat saling menutupi dan memanfaatkan. Terkait dengan urutan dan skala signifikansi masing-masing faktor, maka menurut penulis adalah sulit untuk melakukan generalisasi atas faktor mana menyebabkan apa, atau faktor mana yang menjadi bahan pertimbangan paling mendasar. Penulis melihat bahwa kasus yang berbeda dapat melibatkan pola interaksi yang berbeda pula. **Format dari keragaman pola interaksi tersebut menurut penulis dapat mengambil bentuk sebagai berikut:**

1. **Kepentingan ekonomi-politik yang dijustifikasi oleh kepentingan identitas (Seperti dalam kasus AS-Afghanistan).**
2. **Kepentingan identitas memunculkan kepentingan ekonomi-politik, yang kemudian kembali dijustifikasi oleh alasan identitas (Seperti dalam kasus Revolusi Iran 1979).**